



**PENGADILAN
TINGGI AGAMA
PADANG**

LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN
WILAYAH SUMATERA BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024
BAGIAN ANGGARAN 005.01
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air Padang
Telp. 0751 7054806 Fax. 0751 40537

25179

keuangan@pta-padang.go.id

(UNAUDITED)



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. By Pass Km 24 Anak Air Padang

Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537

Padang - Sumatera Barat 25179

e-mail : keuangan@pta-padang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 04 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

DR. IRSYADI, S.Ag., M.Ag.
NIP.197007021996031005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel dan Lampiran	viii
Pernyataan Tanggung Jawab	xi
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	11
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	13
V. Catatan atas Laporan Keuangan	15
A. Penjelasan Umum	15
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang	15
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	16
A.3. Basis Akuntansi	17
A.4. Dasar Pengukuran	17
A.5. Kebijakan Akuntansi	17
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	26
B.1. Pendapatan	26
B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	26
B.2. Belanja	28
B.2.1. Belanja Pegawai	30
B.2.2 Belanja Barang	32
B.2.3. Belanja Modal	33
B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33
B.2.3.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	35

C.1.	Aset Lancar	35
C.1.1.	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid).....	35
C.1.2.	Persediaan.....	37
C.2.	Aset Tetap.....	38
C.2.1.	Tanah	39
C.2.2	Peralatan dan Mesin	39
C.2.3.	Gedung dan Bangunan.....	40
C.2.4.	Jalan , Irigasi, dan Jaringan.....	41
C.2.5	Aset Tetap Lainnya	41
C.2.6.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	42
C.3	Aset Lainnya	42
C.3.1.	Aset Tak berwujud.....	43
C.3.2	Aset Lain-lain.....	44
C.3.3.	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	44
C.4.	Kewajiban Jangka Pendek	45
C.4.1.	Utang Kepada Pihak Ketiga	45
C.5.	Ekuitas	46
D.	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	47
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	47
D.2.	Beban Pegawai	47
D.3.	Beban Persediaan.....	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	51
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	52
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	53
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	55
E.1.	Ekuitas Awal	55
E.2.	Surplus (defisit) LO	55
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi.....	55

E.4.	Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas	55
E.4.1.	Selisih Revaluasi Aset	56
E.4.2.	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	56
E.5.	Transaksi Antar Entitas	57
E.5.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	57
E.5.2.	Transfer Masuk / Transfer Keluar	58
E.6.	Ekuitas Akhir	58
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	60
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	60
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	60
F.2.1.	Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK	60
F.2.2.	Rekening Pemerintah	60
F.2.3.	Revisi DIPA	60
F.2.4.	Ralat SPM, SSBP, dan SSPB	61
F.2.5.	Catatan Penting Lainnya	62

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2024	1
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023	2
Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	3
Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	4
Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	22
Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang	24
Tabel 7 Tabel Masa Manfaat.....	25
Tabel 8 Revisi Anggaran	26
Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPer 31 Desember 2024	27
Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBPer 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	27
Grafik 11 Perubahan PNBPer Tahun 2024 dan 2023	28
Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024	28
Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024.....	29
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023	30
Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	31
Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	32
Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023	33
Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023	34
Tabel 19 Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	35
Tabel 20 Perbandingan Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024	36
Tabel 21 Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	37
Tabel 22 Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024.....	38
Tabel 23 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	39
Tabel 24 Rincian Saldo Tanah	39
Tabel 26 Mutasi Gedung dan Bangunan 31 Desember TA 2024	40
Tabel 27 Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024.....	41
Tabel 28 Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya TA 2024.....	41
Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024	42
Tabel 30 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023.....	43
Tabel 31 Rincian Aset tak Berwujud TA 2024	43
Tabel 32 Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024	43
Tabel 33 Mutasi Aset Lain- Lain per 31 Desember 2024.....	44
Tabel 34 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2024.....	45
Tabel 35 Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	45
Tabel 36 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2024 dan 2023	46
Tabel 37 Perbandingan PNBPer TA 2024 dan TA 2023	47
Tabel 38 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	48
Tabel 39 Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	49
Tabel 40 Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	50
Tabel 41 Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.....	51

Tabel 42 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023	52
Tabel 43 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023	52
Tabel 44 Perbandingan Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023	53
Tabel 45 Perbandingan Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas TA 2024 dan 2023.....	55
Tabel 46 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024	57
Tabel 47 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2024 dan 2023.....	58
Tabel 48 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2024 dan 2023	58
Tabel 49 Revisi Satker TA 2023	60
Tabel 50 Daftar Perubahan Pejabat TA 2024	62

Lampiran:

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/ Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/
Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rincian Hibah

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB



Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass Km 24 Anak Air Padang Padang - Sumatera Barat 25179
Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537 e-mail : keuangan@pta-padang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 04 Februari 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

DR. IRSYADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197007021996031005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2024 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 21.256.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2024 adalah sebesar Rp15.189.060.932 atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.221.613.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan Tahun 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024			TA 2023
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	0	21.256.000	0	30.566.499
Belanja Negara	15.221.613.000	15.189.060.932	100	13.825.230.328

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 23.127.359.700, yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 40.784.505, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 23.083.547.380, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 3.027.815.

Nilai Kewajiban dan ekuitas masing-masing sebesar Rp 640.000 dan Rp 23.126.719.700.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	2024	2023	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	40.784.505	41.186.407	(401.902)	(0,98)
Aset Tetap	23.083.547.380	23.491.338.075	(407.790.695)	(1,74)
Aset Lainnya	3.027.815	3.027.815	0	0
Jumlah Aset	23.127.359.700	23.535.552.297	(408.192.597)	(1,73)
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	640.000	66.040.494	(65.400.494)	(99,03)
Jumlah Kewajiban	640.000	66.040.494	(65.400.494)	(99,03)
Ekuitas	23.126.719.700	23.469.511.803	(342.792.103)	(1,46)
Jumlah Ekuitas	23.126.719.700	23.469.511.803	(342.792.103)	(1,46)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	23.127.359.700	23.535.552.297	(408.192.597)	(1,46)

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non-operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit)-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 4.547.000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 15.531.853.035, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(15.527.306.035), Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-

masing sebesar Rp16.709.000 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp(15.510.597.035).

Ringkasan Laporan Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3 Laporan Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LO		Kenaikan/Penurunan	
	2024 (Rp)	2023(Rp)	Rp	%
KEGIATAN OPERASIONAL				
Pendapatan Operasional	4.547.000	5.386.500	(839.500)	(15,58)
Beban Operasional	15.531.853.035	14.541.619.165	990.233.870	6,81
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional	(15.527.306.035)	(14.536.232.665)	(991.073.370)	6,81
KEGIATAN NON OPERASIONAL				
Surplus (Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	16.471.000	25.179.999	(8.708.999)	(34,58)
Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya	238.000	0	238.000	0
Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	16.709.000	25.179.999	(8.470.999)	(33,64)
Pos Luar Biasa	0	0	0	0
Surplus (Defisit) - LO	(15.510.597.035)	(14.511.052.666)	(999.544.369)	6,88

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp23.469.511.803 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(15.510.597.035), ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp15.167.804.932 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp23.126.719.700.

Rincian Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4 Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Tanggal LPE		Kenaikan/Penurunan	
	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Rp	%
EKUITAS AWAL	23.469.511.803	24.090.645.713	(621.133.910)	(2,58)
Surplus (Defisit) LO	(15.510.597.035)	(14.511.052.666)	(999.544.369)	6,89
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	0	0	0	0
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0	3.773.677	(3.773.677)	(100)
Transaksi Antar Entitas	15.167.804.932	13.886.145.079	1.281.659.853	9,23
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	(342.792.103)	(621.133.910)	278.341.807	(44,81)
EKUITAS AKHIR	23.126.719.700	23.469.511.803	(342.792.103)	(1,46)

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Pendapatan Negara, Laporan Realisasi Anggaran Belanja Negara dan Hibah, untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2024			TA 2023
		Anggaran	Realisasi	% thd Angg	Realisasi
A. Pendapatan	B.1				
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	21.256.000	0	30.566.499
Jumlah Pendapatan		0	21.256.000	0	30.566.499
B. Belanja	B.2				
1. Belanja Pegawai	B.2.1.	11.516.144.000	11.485.641.080	99,73	10.204.315.810
2. Belanja Barang	B.2.2.	3.705.469.000	3.703.419.852	99,94	3.423.030.068
3. Belanja Modal	B.2.3.	0	0	0	197.884.450
Jumlah Belanja		15.221.613.000	15.189.060.932	99,78	13.825.230.328

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.1. 1.	7.743.351	7.482.482
Persediaan	C.1. 2.	33.041.154	33.703.925
Jumlah Aset Lancar		40.784.505	41.186.407
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	14.038.111.000	14.038.111.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	4.556.831.473	5.440.947.906
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	10.383.266.950	10.383.266.950
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	86.604.974	86.604.974
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 6.	(5.981.267.017)	(6.457.592.755)
Jumlah Aset Tetap		23.083.547.380	23.491.338.075
Aset Lainnya	C.3		
Aset tak Berwujud	C.3. 1.	15.838.220	15.838.220
Aset Lain-Lain	C.3. 2.	907.381.248	23.264.815
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3. 3.	(920.191.653)	(36.075.220)
Jumlah Aset Lainnya		3.027.815	3.027.815
Jumlah Aset		23.127.359.700	23.535.552.297
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4. 1.	640.000	66.040.494
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		640.000	66.040.494
Jumlah Kewajiban		640.000	66.040.494

EKUITAS			
Ekuitas	C.5	23.126.719.700	23.469.511.803
Jumlah Ekuitas		23.126.719.700	23.469.511.803
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		23.127.359.700	23.535.552.297

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG LAPORAN OPERASIONAL PER 31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023 (dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D. 1	4.547.000	5.386.500
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	11.420.240.586	10.261.633.801
Beban Persediaan	D. 3	46.710.028	34.330.470
Beban Barang dan Jasa	D. 4	2.308.888.891	2.473.846.908
Beban Pemeliharaan	D. 5	750.575.458	821.015.043
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	597.647.377	518.657.197
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	407.790.695	432.135.746
Jumlah Beban		15.531.853.035	14.541.619.165
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(15.527.306.035)	(14.536.232.665)
Kegiatan Non Operasional			
Pendapatan Pelepasan Aset		16.471.000	25.179.999
Beban Pelepasan Aset		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		238.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		16.709.000	25.179.999
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(15.510.597.035)	(14.511.052.666)
Pos Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(15.510.597.035)	(14.511.052.666)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas Awal	E.. 1	23.469.511.803	24.090.645.713
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E.. 2	(15.510.597.035)	(14.511.052.666)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	E. 3	0	0
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E. 4	0	3.773.677
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.1	0	0
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.2	0	11.941.780
Transaksi Antar Entitas	E. 5	15.167.804.932	13.886.145.079
Kenaikan/penurunan ekuitas		(342.792.103)	(621.133.910)
Ekuitas Akhir	E. 6	23.126.719.700	23.469.511.803

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Tahun 2004 adalah menjadi tonggak baru sejarah peradilan di Indonesia, seluruh badan peradilan dihimpun dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri ini semakin nyata dengan disahkannya beberapa undang-undang termasuk Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undang-Undang tersebut memuat beberapa perubahan antara lain semakin bertambahnya kewenangan mengadili bagi Peradilan Agama yaitu mengenai Ekonomi Syari'ah.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas pokok Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menetapkan visi yang mengacu kepada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang Yang Agung “

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Padang menyusun rencana strategis dengan tujuan:

- a. Terlaksananya Peradilan yang profesional, berkualitas, efektif dan efisien serta terciptanya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;
- b. Memantapkan penerapan dan pelaksanaan pola bindalmin sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1991;
- c. Terbinanya koordinasi yaang efektif antara Aparatur Penegak Hukum dan Institusi Agama diwilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- d. Terciptanya masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum;
- e. Tersusnya laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama se Sumatera Barat;
- f. Terlaksananya Pengawasan terhadap penyelenggaraan Peradilan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementrian Negara/lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul- modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran;
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul ,yaitu modul Komitmen(meliputi sub-modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran;
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu,

dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan disajikan sebagai Bagian Lancar Piutang.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

c. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat

langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan nomor 620/KM.6/2018 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Softwate computer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasian Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8.) Penyisihan Utang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

Tabel 6 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

(9.) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan

Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7 Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi saat pelaksanaan.

Perubahan anggaran dari awal tahun hingga akhir tahun berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 8 Revisi Anggaran

Uraian	2024	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	10.166.144.000	11.516.144.000
Belanja Barang	3.588.309.000	3.705.469.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	13.754.453.000	15.221.613.000

B.1. Pendapatan

*Realisasi
Pendapatan:
Rp21.256.000*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp21.256.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Keseluruhan Pendapatan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Realisasi PNBP:
Rp 21.256.000*

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 21.256.000 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan.

Tabel 9 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21.256.000	0
Total Pendapatan		0	21.256.000	0

Realisasi Pendapatan TA 2024 mengalami penurunan sebesar 30,45 persen dibanding realisasi TA 2023. Hal ini disebabkan karena:

1. Pada tahun 2023 terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin yaitu penjualan satu unit mobil merk Soluna yang telah rusak berat sedangkan pada tahun 2024 hanya ada pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu penjualan bongkaran seharga Rp3.150.000 yang berasal dari bongkaran atas renovasi ruangan Hakim Tinggi;
2. Untuk Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan menurun dikarenakan rumah negara yang tidak ditempati pejabat dari awal Tahun 2024 karena memiliki hunian sendiri .

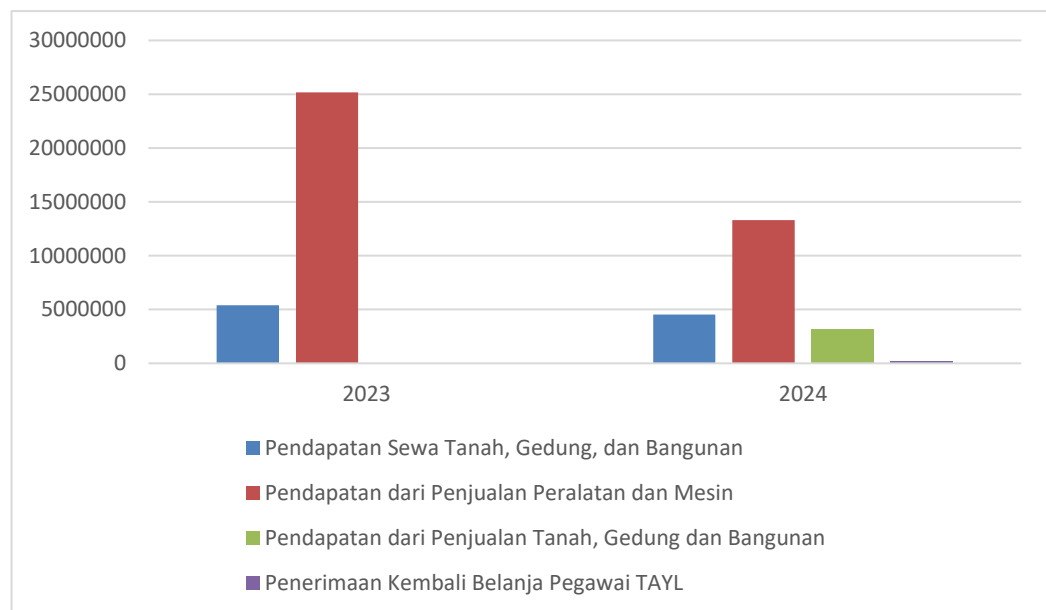
Perbandingan realisasi PNBP TA 2024 dan 2023 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 10 Perbandingan Realisasi PNBP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.547.000	5.386.500	(839.500)	(15,58)
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	13.321.000	25.179.999	(11.858.999)	(47,09)
3.	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	3.150.000	0	3.150.000	0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	238.000	0	238.000	0
Total Pendapatan		21.256.000	30.566.499	(9.310.499)	(30,45)

Perubahan pendapatan dari tahun 2024 ke 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 11 Perubahan PNBP Tahun 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)



B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
:
Rp15.189.060.9
32

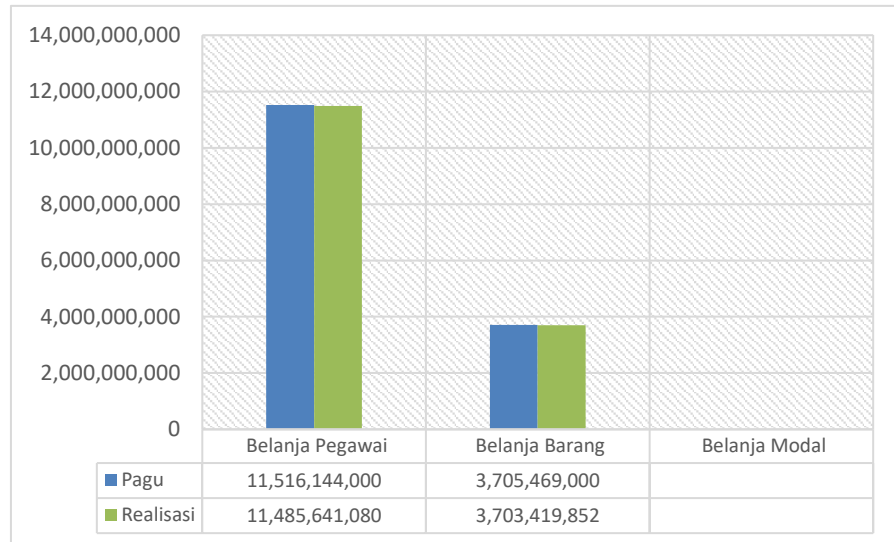
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 15.189.060.932 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99,78 persen dari anggaran senilai Rp 15.221.613.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	11.516.144.000	11.485.829.006	99,73
Belanja Barang	3.705.469.000	3.704.499.852	99,97
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	15.221.613.000	15.190.328.858	99,79
Pengembalian Belanja	0	(1.267.926)	0
Total Belanja Netto	15.221.613.000	15.189.060.932	99,78

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Grafik 13 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)



Dibanding tahun 2023, realisasi belanja tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,86 persen. Kenaikan ini terjadi pada akun belanja pegawai dan belanja barang. Hal ini disebabkan antara lain:

- Pada Belanja pegawai: Banyaknya mutasi pegawai yang terjadi ditahun 2024 dan adanya KGB dan kenaikan pangkat dan jabatan serta penambahan pegawai baik CPNS. Pada akhir tahun 2024 juga adanya kenaikan gaji pada Hakim Tinggi yang tercantum pada PP Nomor 44 Tahun 2024.
- Pada Belanja Barang: dilihat dari presentasi realisasi mengalami kenaikan yaitu 8,19 % dari pada tahun lalu. Ini dikarenakan pagu anggaran tahun ini lebih banyak dari pada tahun lalu.

Perbandingan realisasi belanja TA 2024 dan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	11.485.641.080	10.204.315.810	1.281.325.270	12,55
Belanja Barang	3.703.419.852	3.423.030.068	280.389.784	8,19
Belanja Modal	0	197.884.450	(197.884.450)	(100)
Total Belanja	15.189.060.932	13.825.230.328	1.363.830.604	9,86

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
11.485.641.080

Realisasi Belanja Pegawai pada lingkup Pengadilan Tinggi Agama Padang meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/ POLRI. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp 11.485.641.080 dan Rp10.204.315.810.

Realisasi Belanja TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,55 persen dari tahun 2023. Hal ini antara lain disebabkan oleh:

- Banyaknya pegawai yang mutasi masuk dari pada yang keluar, seperti banyak nya pegawai yang diangkat menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga Belanja Tunjangan Fungsional meningkat;
- Adanya penambahan CPNS pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Adanya kenaikan Tunjangan Fungsional Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang tercantum pada PP Nomor 44 Tahun 2024.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 15 Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	3.802.623.980	3.209.962.160	592.661.820	18,46
Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.486	39.759	12.727	32,01
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	295.525.980	254.281.440	41.244.540	16,22
Belanja Tunj. Anak PNS	71.397.420	63.531.234	7.866.186	12,38
Belanja Tunj. Struktural PNS	73.620.000	91.845.000	(18.225.000)	(19,84)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	5.355.722.000	5.026.332.000	329.390.000	6,55
Belanja Tunj. PPh PNS	1.049.991.628	955.174.090	94.817.538	9,92
Belanja Tunj. Beras PNS	161.134.500	152.444.100	8.690.400	5,70
Belanja Uang Makan PNS	515.246.000	387.204.000	128.042.000	33,06
Belanja Tunjangan Umum PNS	27.900.000	29.080.000	(1.180.000)	(4,05)
Belanja Gaji Pokok PPPK	89.700.800	23.732.000	65.968.800	277,97
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.756	492	1.264	256,91
Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040	1.186.600	3.298.440	277,97
Belanja Tunj. Anak PPPK	1.794.016	474.640	1.319.376	277,97
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	14.840.000	4.240.000	10.600.000	250
Belanja Tunj. Beras PPPK	5.069.400	1.448.400	3.621.000	250
Belanja Uang Makan PPPK	16.724.000	5.365.000	11.359.000	211,72
Total Belanja Bruto	11.485.829.006	10.206.340.915	1.279.488.091	12,53
Pengembalian Belanja	(187.926)	(2.025.105)	(1.837.179)	90,72
Total Belanja Netto	11.485.641.080	10.204.315.810	1.281.325.270	12,55

Pada tahun 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp 187,926 yaitu pada akun Belanja Tunjangan Umum PNS dan Belanja Pembulatan Gaji PNS masing- masing sebesar Rp 185.000 dan Rp 2.926. Ini disebabkan oleh ada nya Mutasi dan Promosi Kepala Sub bagian Kepegawaian dan IT pada Pengadilan Tinggi Agama yang di promosi kan menjadi Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati dan diganti kan oleh penata layanan operasional, Sehingga adanya pengembalian gaji sebagai staf.

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi
Belanja Barang
:
Rp3.703.419.852

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp3.703.419.852 dan Rp3.423.030.068.

Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,19 persen dibanding realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Anggaran yang di dapat tahun 2024 lebih besar dari tahun lalu.
- Realisasi belanja sewa fotocopy yang lebih besar dari tahun lalu
- Belanja perjalanan dinas dalam kota yang lebih besar anggaran dan realisasi nya dan Adanya akun belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota tahun 2024 ini.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16 Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp.	%
1. Belanja Barang Operasional	879.666.600	926.751.376	(47.084.776)	(5,08)
2. Belanja Barang Non Operasional	3.540.000	19.382.330	(15.842.330)	(81,73)
3. Belanja Barang Persediaan	58.135.217	58.949.192	(813.975)	(1,38)
4. Belanja Jasa	1.427.023.160	1.085.597.782	341.425.378	31,45
5. Belanja Pemeliharaan	738.487.498	814.602.191	(76.114.693)	(9,34)
6. Belanja Perjalanan Dinas	597.647.377	518.657.197	78.990.180	15,22
Total Belanja Brutto	3.704.499.852	3.423.940.068	280.559.784	8,19
Pengembalian Belanja	(1.080.000)	(910.000)	(170.000)	18,68
Total Belanja Netto	3.703.419.852	3.423.030.068	280.389.784	8,19

Pada Tahun 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp1.080.000 yaitu pada akun Belanja sewa (sewa rumah dinas hakim) yang mutasi dan promosi.

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal
:Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan TA 2023 adalah sebesar Rp 0 dan Rp 197.884.450.

Realisasi Belanja Modal TA 2024 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibanding realisasi tahun lalu. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk belanja modal tahun 2024.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17 Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	197.884.450	(197.884.450)	(100)
Total Belanja Brutto	0	197.884.450	(197.884.450)	(100)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	197.884.450	(197.884.450)	(100)

B.2.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

*Realisasi
Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin:Rp 0*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp 0.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 tidak ada.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18 Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	0	0	0	0
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	0	0	0

B.2.3.2. Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan

Realisasi
Belanja
Penambahan
Nilai Gedung
dan
Bangunan: Rp 0

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp 197.884.450.

Realisasi belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan TA 2024 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak mendapat anggaran belanja modal.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar: Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp40.784.505 dan Rp 41.186.407.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 dan 2023 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 19 Perbandingan Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	7.743.351	7.482.482
Persediaan	33.041.154	33.703.925
Total Aset Lancar	40.784.505	41.186.407

C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

**Belanja
Dibayar
Dimuka
(Prepaid):**
Rp.7.743.351

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp7.743.351 dan Rp7.482.482. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkannya secara penuh dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang/ jasa belum diterima seluruhnya.

Rincian Belanja Dibayar di Muka disajikan dalam tabel di bawah:

Tabel 20 Perbandingan Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Sewa web hosting pta-padang.go.id	2.397.600	2.397.600
2.	Sewa domain Hosting	37.000	41.625
3.	langganan Zoom Meeting	2.916.667	2.841.667
4.	Langganan VPS (aplikasi)	0	623.554
5.	Sewa Web Buku Tamu Elektronik	1.392.384	1.218.336
6.	Langganan VPS (BADILAG CCTV)1	179.850	179.850
7.	Langganan VPS (BADILAG CCTV)2	179.850	179.850
8.	Langganan Licensi Canva Pro	640.000	0
	Jumlah	7.743.351	7.482.482

Belanja dibayar dimuka terdiri dari 7 item dengan rincian sebagai berikut:

1. Sewa web hosting pta- padang. Go .id

periode 15 September 2024 s.d 14 September 2025, dengan nilai SP2D Rp3.596.400

2. Sewa Domain

periode 15 September 2024 s.d 14 September 2025 dengan nilai SP2D Rp55.500.

3. Langganan Zoom Meeting

Periode 02 November 2024 s.d 01 November 2025 dengan nilai SP2D Rp 3.500.000.

4. Langganan Licensi Canva Pro

Periode 08 September 2024 s.d 07 September 2025 dengan nilai SP2D Rp 960.000.

5. Sewa web buku tamu Elektronik

Periode 19 Agustus 2024 s.d 18 Agustus 2025 dengan nilai SP2D Rp 2.088.576.

6. Langganan VPS (Badilag CCTV)1

Periode 16 Januari 2024 s.d 15 Januari 2025 dengan nilai SP2D Rp 2.158.200.

7. Langganan VPS (Badilag CCTV)2

Periode 16 Januari 2024 s.d 15 Januari 2025 dengan nilai SP2D Rp 2.158.200.

Adapun data dukung belanja di bayar dimuka ada pada lampiran laporan ini.

C.1.2. Persediaan

*Persediaan:
Rp.33.041.154*

Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp33.041.154 dan Rp33.703.925. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Perbandingan Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Barang Konsumsi	21.551.394	23.071.705
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	11.489.760	10.632.220
	Total	33.041.154	33.703.925

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik, sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor: 3950.a/SEK.PTA.W3-A/PL1.2/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang terlampir pada data dukung Laporan Keuangan ini.

Adapun mutasi persediaan selama tahun berjalan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 22 Mutasi Persediaan per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	33.703.925
Mutasi Tambah	
Pembelian Barang Konsumsi	45.189.717
Pembelian Bahan untuk Pemeliharaan	12.945.500
Perolehan Lainnya Untuk Pemeliharaan	
Koreksi Kuantitas Tambah Untuk Pemeliharaan	
Mutasi Kurang	
Pemakaian Barang Konsumsi	(46.710.028)
Pemakaian Bahan untuk Pemeliharaan	(12.087.960)
Koreksi Kuantitas Kurang Untuk Pemeliharaan	
Koreksi Penyesuaian Persediaan Barang Konsumsi	(0)
Koreksi Penyesuaian Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	(0)
Opname Fisik Barang Konsumsi	(0)
Opname Fisik Bahan untuk Pemeliharaan	(0)
Saldo per 31 Desember 2024	33.041.154

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp23.083.547.
380

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tersaji sebesar Rp23.083.547.380 dan Rp23.491.338.075. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 23 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
1	Tanah	14.038.111.000	14.038.111.000	0	0
2	Peralatan dan Mesin	4.556.831.473	5.440.947.906	(884.116.433)	(16,25)
3	Gedung dan Bangunan	10.383.266.950	10.383.266.950	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	86.604.974	86.604.974	0	0
Jumlah		29.064.814.397	29.948.930.830	(884.116.433)	(2,95)
Akumulasi Penyusutan		(5.981.267.017)	(6.457.592.755)	476.325.738	(7,38)
Nilai Buku Aset Tetap		23.083.547.380	23.491.338.075	(407.790.695)	(1,74)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
14.038.111.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 tidak ada perubahan, yaitu sebesar Rp 14.038.111.000. Pada tahun 2024 ini tidak ada mutasi aset tanah.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Rincian Saldo Tanah

No.	No. Sertifikat	Lokasi	Atas Nama	Peruntukan	Luas (m ²)	Jumlah
1.	18/2010	Gajah Mada No. 53	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Rumah dinas pimpinan	4.000	5.235.633.000
2.	05/2013	Kampung Baru Berok	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Rumah dinas wakil ketua	409	713.278.000
3.	27/2013 dan 28/2013	By Pass KM 24	Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung	Kantor PTA Padang	11.984	8.089.200.000
Jumlah					16.393	14.038.111.000

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp
4.556.831.473

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp4.556.831.473 dan Rp 5.440.947.906.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	5.440.947.906
Mutasi Tambah	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(884.116.433)
Saldo per 30 September 2024	4.556.831.473
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2024	(4.295.610.202)
Nilai Buku 30 September 2024	261.221.271

Mutasi kurang berupa Penghentian Aset dari Penggunaan sebesar Rp884.116.433 berupa: printer, meja kerja kayu, kursi besi, mesin tik manual, pesawat telephone, Laptop, karpet, menara antena, lemari kayu, PC Unit, Lcd projector, AC Split, Unit Tranceiver VHF Trabsportable, Uninterruptible Power Supply (UPS), Kipas angin, Camera Digital, CCTV, Exhaust fan, lambang garuda pancasila, Genset.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
10.383.266.950*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- masing adalah sebesar Rp 10.383.266.950.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 25 Mutasi Gedung dan Bangunan 31 Desember TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	10.383.266.950
Mutasi Tambah	
Saldo per 31 Desember 2024	10.383.266.950
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(1.601.247.387)
Nilai Buku 31 Desember 2024	8.782.019.563

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing- masing sebesar Rp 0.

Mutasi transaksi terhadap nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 26 Mutasi Transaksi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	151.017.000
Mutasi Tambah /kurang	0
Saldo per 31 Desember 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya: Rp
86.604.974

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp86.604.974. Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 27 Mutasi Nilai Aset Tetap Lainnya TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	86.604.974
Mutasi Tambah (tidak ada mutasi tambah)	0
Saldo per 31 Desember 2024	86.604.974
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	0
Nilai Buku 31 Desember 2024	86.604.974

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp
(5.981.267.017)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp(5.981.267.017) dan Rp(6.457.592.755).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 28 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	4.556.831.473	4.380.019.630	176.811.843
2	Gedung dan Bangunan	10.383.266.950	1.601.247.387	8.782.019.563
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	86.604.974	0	86.604.974
Jumlah		15.026.703.397	5.981.267.017	9.045.436.380

C.3 Aset Lainnya

*Aset Lainnya: Rp
3.027.815*

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 memiliki nilai yang sama yakni sebesar Rp3.027.815.

Tabel 29 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	2024	2023	perubahan
Aset Tak Berwujud	15.838.220	15.838.220	0
Aset Lain-lain	907.381.248	23.264.815	884.116.433
Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi Aset Lainnya	(920.191.653)	(36.075.220)	(884.116.433)
Jumlah Total	3.027.815	3.027.815	0

C.3.1. Aset Tak berwujud

Aset Tak
Berwujud :
Rp 15.838.220

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama yakni sebesar Rp15.838.220. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Aset tak Berwujud TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
Software Komputer		
1.	Website <i>pta-padang.go.id</i>	5.500.000
2.	Aplikasi Pustaka	5.390.000
3.	Kaspersky Anti-Virus Suite for WKS and FS	4.948.220
Jumlah Total		15.838.220

Mutasi nilai aset tak berwujud tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	15.838.220
[Tidak ada mutasi tambah kurang]	
Saldo per 31 Desember 2024	15.838.220
Akumulasi Amortisasi s.d 31 Desember 2024	(15.838.220)
Nilai Buku 31 Desember 2024	0

C.3.2 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp 907.381.248

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing- masing sebesar Rp907.381.248 dan Rp23.264.815. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 32 Mutasi Aset Lain- Lain per 31 Desember 2024
(dalam satuan Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	23.264.815
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(884.116.433)
Saldo per 31 Desember 2024	907.381.248
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2024	(904.353.433)
Nilai Buku 31 Desember 2024	3.027.815

Aset Lain- Lain merupakan aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah. Dan per 31 Desember 2024 telah berkurang senilai Rp 884.116.433 dari tahun lalu. Hal ini dikarenakan telah dilaksanakannya penghapusan barang yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah berupa printer, meja kerja kayu, kursi besi, mesin tik manual, pesawat telephone, Laptop, karpet, menara antena, lemari kayu, PC Unit, Lcd projector, AC Split, Unit Tranceiver VHF Trabsportable, Uninterruptible Power Supply (UPS), Kipas angin, Camera Digital, CCTV, Exhause fan, lambang garuda pancasila, Genset.

C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya :
Rp(920.191.653
)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sama sebesar Rp (920.191.653) dan Rp (36.075.220). Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 33 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya TA 2024
(dalam satuan Rupiah)

No.	Aset lain-lain	Nilai Perolehan	Akumulasi penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset tak berwujud	15.838.220	(15.838.220)	0
2.	Aset lain-lain	907.381.248	(904.353.433)	3.027.815
Jumlah Total		923.219.468	(920.191.653)	3.027.815

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp640.000

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp640.000 dan Rp66.040.494. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Agama Padang per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 34 Perbandingan Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Utang Kepada Pihak Ketiga	640.000	66.040.494
Jumlah	640.000	66.040.494

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp 640.000

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar Rp640.000 dan Rp66.040.494. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Tinggi Agama Padang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 35 Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
1.	Beban Gaji Pokok PNS	0	11.190.400
2.	Beban Tunj. Suami/Istri	0	971.040
3.	Beban Tunj. Anak	0	259.176
4.	Beban Tunj. Pembulatan	0	1.799
5.	Beban Tunj.PPH	0	1.968.976
6.	Belanja tunj. Fungsional PNS	100.000	120.000
7.	Belanja Uang Makan PNS	0	43.361.000
8.	Koreksi Lainnya	0	8.168.103
9.	Belanja Tunj. Struktural PNS	540.000	
Jumlah		640.000	66.040.494

Utang kepada pihak ketiga tahun 2024 sebesar Rp 540.000 merupakan kekurangan gaji 2 orang pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang yang disebabkan oleh kekurangan gaji yang belum diajukan di tahun 2024 dikarenakan kenaikan jabatan.

C.5. Ekuitas

Ekuitas:
Rp
23.126.719.700

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.126.719.700 dan Rp23.469.511.803. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

PNBP:
Rp4.547.000

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.547.000 dan Rp5.386.500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Perbandingan PNBP TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2024	TA 2023	Perubahan (Rp)	Perubahan (%)
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.547.000	5.386.500	(839.500)	(15,58)
Total Pendapatan		4.547.000	5.386.500	(839.500)	(15,58)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan berasal dari pendapatan sewa 3 unit rumah dinas dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 15,58 persen dikarenakan adanya kekosongan 1 rumah dinas dari Januari 2024 sampai Desember 2024 dikarenakan Pimpinan menempati hunian pribadi.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai :
Rp11.420.240.586

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.420.240.586 dan Rp10.261.633.801. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian beban pegawai dapat dilihat pada tabel di berikut:

Tabel 37 Perbandingan Beban Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	3.785.307.680	3.221.152.560	564.155.120	17,51
Beban Pembulatan Gaji PNS	46.947	41.453	5.494	13,25
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	293.942.350	255.252.480	38.689.870	15,16
Beban Tunj. Anak PNS	71.051.784	63.790.410	7.261.374	11,38
Beban Tunj. Struktural PNS	74.160.000	89.820.000	(15.660.000)	(17,43)
Beban Tunj. Fungsional PNS	5.355.702.000	5.025.897.600	329.804.400	6,56
Beban Tunj. PPh PNS	1.046.680.313	957.143.066	89.537.247	9,35
Beban Tunj. Beras PNS	161.134.500	152.444.100	8.690.400	5,70
Beban Uang Makan PNS	471.885.000	430.565.000	41.320.000	9,60
Beban Tunjangan Umum PNS	27.715.000	29.080.000	(1.365.000)	(4,69)
Beban Gaji Pokok PPPK	89.700.800	23.732.000	65.968.800	277,97
Beban Pembulatan Gaji PPPK	1.756	492	1.264	256,91
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	4.485.040	1.186.600	3.298.440	277,97
Beban Tunj. Anak PPPK	1.794.016	474.640	1.319.376	277,97
Beban Tunj. Fungsional PPPK	14.840.000	4.240.000	10.600.000	250,00
Beban Tunj. Beras PPPK	5.069.400	1.448.400	3.621.000	250,00
Beban Uang Makan PPPK	16.724.000	5.365.000	11.359.000	211,72
Total Beban Pegawai	11.420.240.586	10.261.633.801	1.158.606.785	11,29

Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 11,29 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh oleh:

- adanya tambahan 2 pegawai CPNS di Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- adanya mutasi masuk beberapa Panitera Pengganti yang diperbantukan di satuan kerja wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- Kenaikan tunjangan jabatan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp46.710.028*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp46.710.028 dan Rp34.330.470. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Kenaikan beban persediaan disebabkan penganggaran belanja barang persediaan lebih tertib dari tahun anggaran yang lalu.

Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Perbandingan Beban Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	46.710.028	34.330.470	12.379.558	36,06
Total Beban Persediaan	46.710.028	34.330.470	12.379.558	36,06

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa :
Rp2.308.888.891*
1

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.308.888.891 dan Rp2.473.846.908. Beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan beban ini dipengaruhi oleh akun-akun pembentuknya sebagaimana di bawah ini.

Rincian beban barang dan jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	772.878.865	789.005.515	(16.126.650)	(2,04)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3.868.100	2.548.000	1.320.100	51,81
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	61.954.000	100.104.000	(38.150.000)	(38,11)
Beban Barang Operasional Lainnya	44.531.750	35.151.100	9.380.650	26,69
Beban Bahan	3.540.000	12.677.000	(9.137.000)	(72,08)
Beban Langganan Telepon	2.702.696	2.684.582	18.114	0,67
Beban Sewa	1.417.613.480	1.524.971.381	(107.357.901)	(7,04)
Belanja Jasa Profesi	1.800.000	0	1.800.000	0
Beban Peralatan dan Mesin-Ekstrakomptabel	0	6.705.330	(6.705.330)	(100)
Total Beban Jasa	2.308.888.891	2.473.846.908	(164.958.017)	(6,67)

Realisasi Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6,67 dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa belanja yang lebih sedikit realisasinya dari tahun lalu seperti beban sewa dan beban honor operasional satuan kerja.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp750.575.458*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp750.575.458 dan Rp821.015.043.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Perbandingan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	288.433.619	401.976.620	(113.543.001)	(28,25)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	39.295.000	39.299.600	(4.600)	(0,01)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	410.758.879	373.325.971	37.432.908	10,03
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	12.087.960	6.412.852	5.675.108	88,50
Total Beban Pemeliharaan	750.575.458	821.015.043	(70.439.585)	(8,58)

Realisasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,58 dari pada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kecilnya anggaran tahun ini sehingga realisasi yang dilakukan pada akun pemeliharaan gedung dan bangunan juga kecil dari tahun sebelumnya.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp597.647.377*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp597.647.377 dan Rp518.657.197. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	563.017.377	492.377.197	70.640.180	14,35
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	3.450.000	9.480.000	(6.030.000)	(63,61)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	31.180.000	6.940.000	24.240.000	349,28
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	9.860.000	(9.860.000)	(100)
Total Beban Perjalanan Dinas	597.647.377	518.657.197	78.990.180	15,23

Realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 15,23 dari pada realisasi tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena besarnya anggaran tahun ini sehingga realisasi yang dilakukan pada akun perjalanan dinas juga besar, terutama pada perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas paket meeting dalam kota

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
:
Rp407.790.695*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 407.790.695 dan Rp432.135.746. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	173.322.581	200.371.168	(27.048.587)	(13,50)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	234.301.559	231.764.578	2.536.981	1,09
Beban penyusutan Aset Tetap yang tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	166.555	0	166.555	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Amortisasi Software	0	0	0	0

Total Beban Penyusutan	407.790.695	432.135.746	(24.345.051)	(5,63)
------------------------	-------------	-------------	--------------	--------

Sejak tahun 2023 tidak ada lagi beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan. Hal ini disebabkan karena telah dilakukan Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah pada Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp 151.017.000 berupa Koreksi Pencatatan berupa Aset Bangunan Air (sumur Artesis) dan Koreksi Nilai Bertambah kedalam asset Taman Permanen.

D.8. Kegiatan Non Operasional

*Surplus(defisit)
Kegiatan Non
Operasional :
Rp 16.709.000*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 43 Perbandingan Kegiatan Non Operasional TA 2024 dan TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik (Turun) Rp	Naik (Turun) %
<u>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</u>	<u>16.471.000</u>	<u>25.179.999</u>	<u>(8.708.999)</u>	<u>(34,59)</u>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	16.471.000	25.179.999	(8.708.999)	(34,59)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	0
<u>Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional lainnya</u>	<u>238.000</u>	<u>0</u>	<u>238.000</u>	<u>∞</u>
Pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya	238.000	0	238.000	∞
Beban dari kegiatan non operasional	0	0	0	0
Total Surplus/ (Defisit) dari kegiatan Non Operasional	16.709.000	25.179.999	(8.470.999)	<u>(33,64)</u>

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar muncul akibat dilakukannya proses penghapusan barang yang telah rusak berat yaitu berupa peralatan dan mesin yang dilakukan dengan proses lelang.

Pendapatan dari kegiatan non operasional merupakan pengembalian belanja Uang Makan PNS pada bulan Desember 2023 sebesar Rp 119.000 dan sisanya merupakan kelebihan pengembalian belanja Uang Makan PNS.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

*Ekuitas Awal :
Rp23.469.511.803*

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.469.511.803 dan Rp24.090.645.713.

E.2. Surplus (defisit) LO

*Surplus(defisit) LO :
Rp(15.510.597.035)*

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp(15.510.597.035) dan Rp(14.511.052.666) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan
Akuntansi : Rp 0*

Nilai Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi untuk periode 31 Desember 2024 Dan 2023 adalah masing- masing sebesar Rp 0 .

E.4. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas

*Koreksi Yang Menambah/
Mengurangi Ekuitas : Rp0*

Nilai Koreksi yang menambah/ mengurangi ekuitas untuk periode 31 Desember 2024 Dan 2023 adalah Rp0 dan Rp3.773.677.

Tabel 44 Perbandingan Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023	Naik(Turun)Rp	Naik(Turun) %
Selisih Revaluasi Aset Tetap				
Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi				
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	11.941.780	(11.941.780)	(100)
Lain- Lain	0	(8.168.103)	8.168.103	(100)
Total Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Aset	0	3.773.677	(3.773.677)	(100)

E.4.1. Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset : Rp
0

Selisih Revaluasi Aset Tetap diperoleh dari penilaian ulang aset tetap. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap.

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E.4.2. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi nilai aset non revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi aset tetap namun bukan diakibatkan dari kebijakan revaluasi, misalnya koreksi aset yang diakibatkan dari temuan BPK. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp11.941.780. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi ini merupakan koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2024 tidak ada namun pada tahun 2023 terjadi akibat adanya Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang di koreksi menjadi Aset Bangunan Air (sumur Artesis) dan Koreksi Nilai Bertambah kedalam asset Taman Permanen.

E.4.3. Koreksi Lain- Lain

Koreksi Lain- Lain : Rp 0

Koreksi lain- lain untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing- masing sebesar Rp 0 dan Rp (8.169.103). Koreksi lain- lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah , piutang dan utang. Koreksi lain- lain pada periode 2024 tidak ada namun pada tahun 2023 merupakan koreksi atas belanja pegawai yang masih harus dibayar (utang), dimana terdapat koreksi atas belanja pegawai yang mengalami keterlambatan pengajuan KGB dari tahun 2021.

E.5. Transaksi Antar Entitas

*Transaksi Antar Entitas:
Rp15.167.804.932*

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 15.167.804.932 dan Rp13.886.145.079.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 45 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2024
(dalam satuan rupiah)

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(21.256.000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.189.060.932
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	0
Jumlah	15.167.804.932

E.5.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/ Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar Rp(21.256.000) sedangkan DKEL sebesar Rp15.189.060.932.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 46 Perbandingan DDEL dan DKEL TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
DDEL	(21.256.000)	(30.556.499)
DKEL	15.189.060.932	13.825.230.328
Jumlah	15.167.804.932	13.794.673.829

E.5.2. Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan Aset / Kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada interkal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp 0 dan Rp0.

Sedangkan perbandingannya pertahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 47 Perbandingan Transfer Masuk dan Transfer Keluar TA 2024 dan 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2024	TA 2023
Transfer Masuk	0	91.481.250
Transfer Keluar	0	0
Jumlah	0	91.481.250

E.6. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir :
Rp23.126.719.700

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp23.126.719.700 dan Rp23.469.511.803.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan BPK pada Laporan Keuangan periode berjalan maupun atas laporan keuangan tahun yang lalu.

F.2.2. Rekening Pemerintah

Terdapat 1 rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan kode BA.ES1 005.01 (Badan Urusan Administrasi), yaitu: rekening nomor 653244019001000 atas nama BPG 010 Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Bank Rakyat Indonesia yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00. Rekening ini sudah memperoleh izin pembukaan dari KPPN Padang dengan nomor S-2732/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 16 Oktober 2020.

F.2.3. Revisi DIPA

Terdapat 10 kali revisi DIPA yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun 2023. Uraian revisi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Revisi Satker TA 2023

No	Satker	Revisi Ke	Tanggal	Digital Stamp	Keterangan
1	PTA Padang	1	07 Februari 2024	3240-5072-6250-3683	Perubahan Halaman III DIPA
2.	PTA Padang	2	16 Arpil 2024	3240-5072-6250-3683	Perubahan Halaman III DIPA
3	PTA Padang	3	23 April 2024	3240-5072-6250-3683	Perubahan Halaman III DIPA
4	PTA Padang	4	29 Mei 2024	3240-5072-6250-3683	Perubahan Halaman III DIPA

5	PTA Padang	5	12 Juli 2024	3240-5072-6250-3683	Perubahan Halaman III DIPA
6	PTA Padang	6	09 Sept 2024	4030-5211-5730-4421	Revisi Tambahan Anggaran Belanja dan Perubahan Halaman III DIPA
7	PTA Padang	7	16 Okt 2024	7343-5600-6032-4017	Revisi Tambahan Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang (pemeliharaan gedung & peralatan dan mesin) dan Perubahan Halaman III DIPA
8	PTA Padang	8	4 Nov 2024	3842-2568-8044-4407	Revisi Tambahan Anggaran Belanja Non Operasional (Bimtek Layanan BMN)
9	PTA Padang	9	8 Nov 2024	3842-2568-8044-4407	Optimalisasi Anggaran (penggeseran anggaran non ops ke operasional)
10	PTA Padang	10	04 Des 2024	1979-5117-9021-6948	Revisi Tambahan Anggaran Belanja Pegawai (Penyelesaian Pagu Minus belanja pegawai akibat kenaikan tunjangan hakim) dan Perubahan Halaman III DIPA

F.2.4. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak ada melakukan ralat baik SPM, SSBP maupun SSPB hingga tahun 2024 ini.

No	Satker	Uraian	Keterangan
1	401900	Nomor SPM: 00186T/401900/2024 Tanggal SPM : 29 Juli 2024 Nilai : Rp 11.344.800	Koreksi akun belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) ke akun belanja pemeliharaan Peralatan dan mesin (523121)
2	401900	Nomor SPM 00074A Tanggal SPM: 21 Maret 2024 Nilai: Rp 2.407.778	Adanya kesalahn pembebanan akun potongan SPM00074A semula akun 411622 (Pendapatan bunga Penagihan PPN) menjadi 411211 (Pendapatan PPN Dalam Negeri)

F.2.5. Catatan Penting Lainnya

1. Daftar Perubahan Pejabat pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 49 Daftar Perubahan Pejabat TA 2024

NO	Satker	Jabatan	Semula	Menjadi	Ket
1	PTA PADANG	KPA	Ismail,S.H.I.,M.A	Dr.Irsyadi, S.Ag.,M.Ag	01 Sep 2024
2	PTA PADANG	Bendahara Penerima	Yova Nelindy.A.Md	Efri Sukma.S.H.	29 Juli 2024

F.2.5.1 Penjelasan Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2024, output strategis yang telah dicapai oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen memiliki beberapa kegiatan berupa:
 - b. pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi memiliki klasifikasi rincian output berupa layanan Dukungan Manajemen Internal dengan output layanan Umum dan Layanan Perkantoran.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Dilingkungan Mahkamah Agung memiliki klasifikasi rincian output berupa layanan sarana dan prasarana internal dengan output layanan sarana internal.

Secara rinci output Program Dukungan manajemen, dapat kami sampaikan dalam tabel dibawah ini:

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian		
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	15.221.613.000	15.164.952.185	99,63%						
04	PERADILAN	15.221.613.000	15.164.952.185	99,63%						
WA	Program Dukungan Manajemen	15.221.613.000	15.164.952.185	99,63%						

6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariat an Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	15.221.613.000	15.164.952.185	99,63%						
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15.221.613.000	15.164.952.185	99,63%						
962	LAYANAN BMN	9.000.000	8.780.000	97,56%	1,000 0	Layanan	1,0000	100%	2,44 %	00
994	LAYANAN PERKANTOR AN	15.212.613.000	15.156.172.185	99,63%	1,000 0	Layanan	1,0000	100%	0,37 %	00

F.2.6. Monitoring Aplikasi SAKTI dan MONSAKTI

Pada monitoring aplikasi Sakti per tanggal 05 Februari 2025 tidak terdapat selisih/penyajian dalam rekonsiliasi 31 Desember 2024.

LAMPIRAN I

**Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan, Akumulasi
Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap**



Pengadilan Tinggi Agama Padang
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31-12-2023	Beban Peny. Per 31-12-2023	Akm. Peny. Per 31-12-2024	Nilai Buku Per 31-12-2024
A	TANAH						
1	Tanah Persil	-	14.038.111.000	-	-	-	14.038.111.000
	Jumlah		14.038.111.000	-	-	-	14.038.111.000
B	PERALATAN DAN MESIN						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.346.556.412	(1.346.556.412)	-	(1.346.556.412)	-
2	Alat Ukur	2	-	(1.165.889)	1.165.889	-	-
3	Alat Kantor	5	642.544.326	(633.068.731)	17.752.515	(615.316.216)	27.228.110
4	Alat Rumah Tangga	5	1.298.811.300	(1.492.258.836)	195.387.536	(1.296.871.300)	1.940.000
5	Alat Studio	5	119.771.585	(132.088.135)	18.007.270	(114.080.865)	5.690.720
6	Alat Komunikasi	5	59.070.000	(96.383.000)	37.313.000	(59.070.000)	-
7	Peralatan Pemancar	10	-	(282.788.000)	282.788.000	-	-
8	Komputer Unit	4	773.631.523	(853.844.347)	180.459.587	(673.384.760)	100.246.763
9	Peralatan Komputer	4	316.446.327	(252.493.577)	(22.246.500)	(274.740.077)	41.706.250
	Jumlah		4.556.831.473	(5.090.646.927)	710.627.297	(4.380.019.630)	176.811.843
C	GEDUNG DAN BANGUNAN						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	8.877.791.950	(1.152.414.154)	(198.249.922)	(1.350.664.076)	7.527.127.874
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	949.800.000	(138.489.182)	(23.261.437)	(161.750.619)	788.049.381
3	Tugu/Tanda Batas	50	555.675.000	(76.042.492)	(12.790.200)	(88.832.692)	466.842.308
	Jumlah		10.383.266.950	(1.366.945.828)	(234.301.559)	(1.601.247.387)	8.782.019.563
D	IRIGASI						
1	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	30	-	-	-	-	-
	Jumlah		-	-	-	-	-
E	ASET TETAP LAINNYA						
1	Monografi	-	86.604.974	-	-	-	86.604.974
	Jumlah		86.604.974	-	-	-	86.604.974
	Total		29.064.814.397	(6.457.592.755)	476.325.738	(5.981.267.017)	23.083.547.380


 Padang, 20 Januari 2025
 Penanggung Jawab Korwil,
 IFSYADI
 NIP. 197007021996031005

LAMPIRAN II

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)



Pengadilan Tinggi Agama Padang
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Untuk Periode Yang Berakhir pada 31 Desember 2024

No	Uraian	Lokasi	No Kontrak	Nilai Kontrak	Persentase pengerjaan	Nilai Pengerjaan	Ket
1.			NIHIL				
2.							

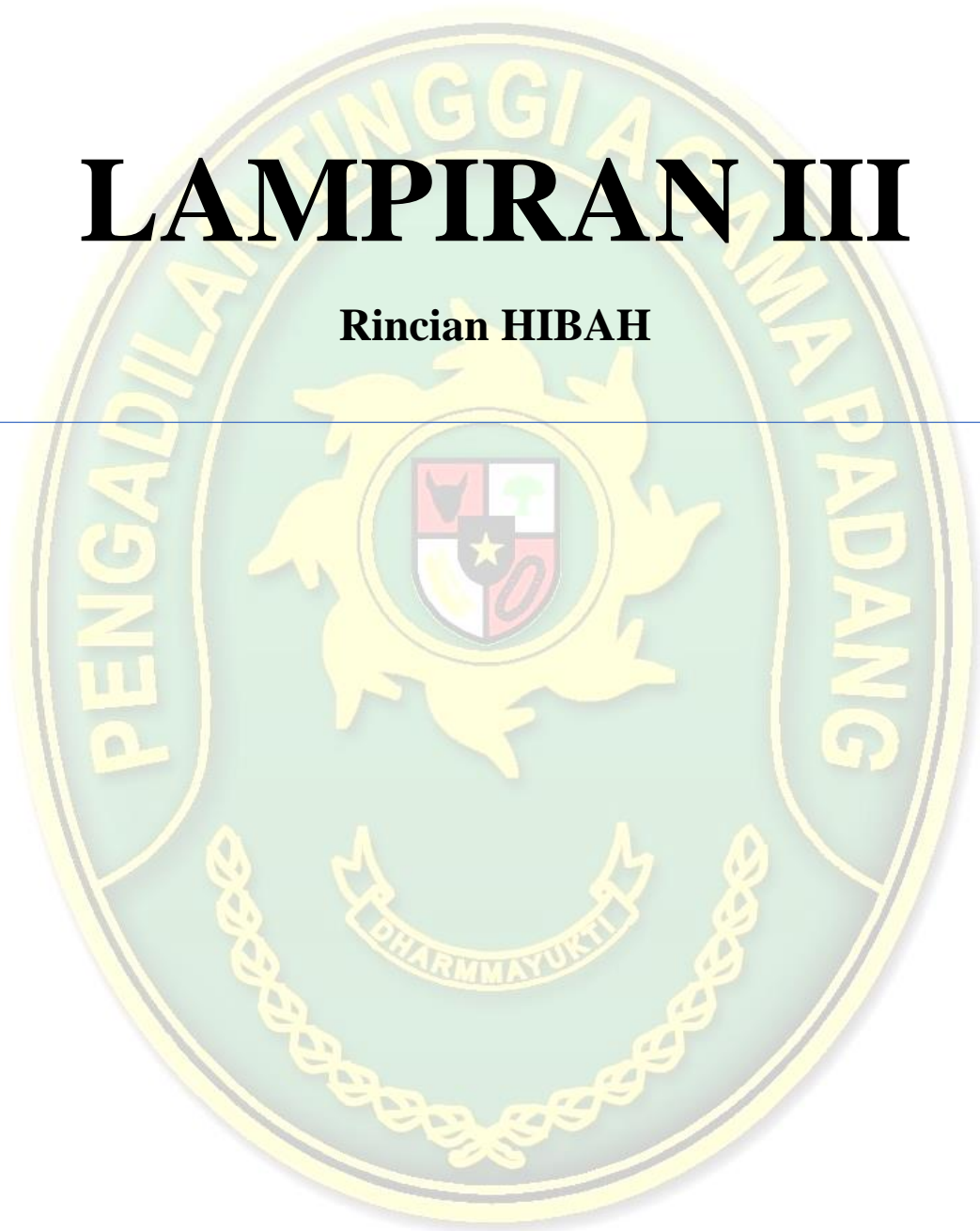
Padang, 20 Januari 2025
Penanggung Jawab Korwil,

IRSYADI
NIP. 197007021996031005



LAMPIRAN III

Rincian HIBAH



REKAPITULASI DATA PENERIMAAN HIBAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
UNTUK BULAN JANUARI S.D. DESEMBER 2024

Bagian Anggaran : 005 (Mahkamah Agung RI)
Eselon : 01 (Badan Urusan Administrasi)

NO	NO.RE- GISTER	NAMA PROJECT	KODE SATKE R	NAMA SATKER	PENERIMAAN UANG MASUK REKENING TAHUN INI				PENERIMAAN HIBAH TAHUN INI (SPHL/ MPHLBJS)					PEMBERIAN HIBAH TAHUN INI							
					TGL PENERIMA AN HIBAH	MATA UANG	NILAI	NO REKE NING	TANGGAL PENGESA HAN	UANG	BARANG / JASA			NO SPHL/ MPHLBJS	TGL PEMB E- RIAN HIBA H	UANG		BARANG / JASA			NO BAS T
										IDR	MATA UANG	VALAS	IDR			MATA UANG	NIL AI	MATA UANG	VALA S	IDR	

Padang, 20 Januari 2025
Penanggung Jawab Korwil,
IRSYADI
NIK. 197007021996031005

